

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Konflik Politik dan Manajemen Konflik

2.1.1 Konsep Konflik Politik

Konflik bagian dari dinamika yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Konflik terjadi akibat adanya benturan-benturan yang saling bergesekan. Konflik bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja. Konflik juga dapat dilihat dari sisi positifnya yaitu sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat, sebagai pembelajaran, serta memperluas wawasan dalam menghadapi konflik yang terjadi.

Konflik terbagi menjadi dua bagian, yaitu konflik dalam bentuk kekerasan dan non-kekerasan. Konflik terkait kekerasan muncul dalam konteks masyarakat-negara yang masih belum memiliki kesepakatan mendasar tentang tujuan dan mekanisme pengaturan dan penyelesaian Lembaga. Sebaliknya, konflik non-kekerasan adalah bentuk konflik yang terjadi di masyarakat-negara di mana terdapat kesepakatan mengenai dasar dan tujuan negara serta mengenai mekanisme dari pengaturan dan penyelesaian konflik Lembaga.

Konflik Politik dapat disebut sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan juga pertentangan yang timbul antara beberapa individu, kelompok maupun organisasi sebagai usaha mendapatkan dan atau

mempertahankan sumber daya dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Maswadi Rauf, konflik politik tidak hanya diartikan sebagai konflik individu, karena persoalan yang dipersengketakan dalam konflik politik menyangkut dengan kepentingan orang banyak dan bukan hanya orang-orang tertentu.

Berdasarkan penggolongannya konflik politik dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu konflik politik yang positif dan konflik politik yang negatif. konflik politik positif merupakan konflik yang tidak mengancam dari pada keberadaan sistem politik, yang mana biasanya disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Sebaliknya, konflik politik negatif merupakan konflik yang mampu mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan dengan cara-cara non-konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.

2.1.2 Manajemen & Resolusi Konflik

Manajemen merupakan kegiatan mengelola sumberdaya secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen konflik merupakan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga nantinya tidak mengganggu dan merugikan pihak manapun dan tidak

merugikan dalam hal materiil dan nonmaterial.¹⁵ Resolusi konflik merupakan salah satu bahasan yang ada dalam manajemen konflik.

Menurut Levine, resolusi konflik yaitu merupakan suatu bentuk Tindakan yang dapat mengurangi permasalahan, pemecahan dan penghapusan serta menghilangkan permasalahan. Resolusi konflik menurut Mindes adalah kemampuan dalam melakukan penyelesaian perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan suatu aspek yang penting di dalam suatu pembangunan tepat moral dan sosial sehingga membutuhkan keterampilan dan penilaian yang bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.¹⁶

Resolusi Konflik menurut Ralf Dahrendorf dalam *Conflict Group* seperti dengan bagus dikemukakan Surbakti merupakan anjuran untuk menggunakan beberapa alternatif berikut ini: Konsiliasi yang merupakan bentuk diskusi dan dialog kelembagaan dimana yang berkonflik memiliki kesempatan untuk berdebat secara terbuka, mediasi sebagai bentuk dari pendampingan atau advokasi, Intervensi yang merupakan campur tangan pemerintah atau Lembaga swadaya masyarakat yang ada dan arbitrase yang merupakan bentuk penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.¹⁷

Menurut Prof. DR. Winardi. SE. di dalam bukunya Manajemen Konflik (konflik perubahan dan pembangunan) membahas mengenai lima macam gaya manajemen konflik, di antaranya adalah tindakan menghindari,

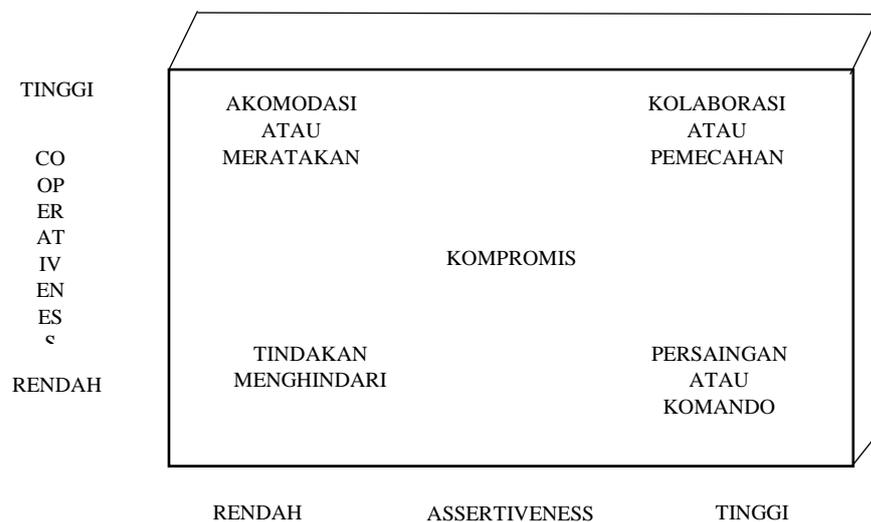
¹⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2016). Modul Kepemimpinan dan Manajemen Konflik. Hal. 12

¹⁶ Wisnu Suhardono. (2015). Konflik dan Resolusi. Hal.4-5

¹⁷ Imam Hidajat. (2009). Teori-Teori Politik. Hal 105

kompetisi atau komando otoritatif, akomodasi atau meratakan, kompromis dan kolaborasi (kerja sama) atau pemecahan masalah. Kelima gaya tersebut diukur berdasarkan sikap kooperatif dan asertif.

Gambar 2.1
Lima Macam Gaya Manajemen Konflik¹⁸



1) **Tindakan Menghindari**

Dalam gaya ini, seseorang melakukan pendekatan dalam menghadapi situasi konflik dengan bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif. Menarik diri dari situasi yang mulai berkembang.

2) **Kompetisi atau Komando Otoritatif**

Bersikap tidak kooperatif tetapi asertif. Bekerja dengan keinginan menentang keinginan pihak lain. Memaksakan segala sesuatunya agar sesuai dengan kesimpulan tertentu.

¹⁸ Winardi. (2007). Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan). Hal.18

3) Akomodasi atau Meratakan

Bersikap kooperatif namun tidak asertif. Berusaha untuk membiarkan pihak lain untuk dominan agar tetap terjadinya harmonisasi di antara keduanya.

4) Kompromis

Bersikap cukup kooperatif dan asertif. Melakukan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan namun tidak secara optimal. Sehingga hasilnya tidak seorangpun merasa bahwa menang ataupun kalah secara mutlak.

5) Kolaborasi (kerja sama) atau Pemecahan Masalah

Bersikap kooperatif dan asertif. Gaya merupakan bentuk upaya dalam mencapai kepuasan dari masing-masing pihak yang berkonflik atau yang berkepentingan. Mencari solusi dari permasalahan yang ada sehingga menemukan keuntungan sebagai hasilnya.

Dari pengertian manajemen konflik menurut Mindes, maka dalam konflik antar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan diperlukan penyelesaian perbedaan berdasarkan dengan penilaian yang tepat. Kemudian dari konflik yang terjadi perlu diamati bagaimana manajemen konflik yang dilakukan partai PDI-P sehingga nantinya dapat di ketahui terkait dengan gaya manajemen konflik mana yang digunakan PDI-P dalam penyelesaian konflik yang terjadi dan dapat menjadi pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi konflik yang serupa.

2.2 Konsep Elit Birokrasi

Menurut Mills, elit politik merupakan mereka yang menduduki posisi pemimpin pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut elit-elit politik dapat mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁹ Menurut Laswell, elit politik adalah semua pemegang kekuasaan di dalam suatu bangunan politik. Terdiri dari mereka yang berhasil mencapai posisi yang dominan dalam sistem politik serta kehidupan sosial. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan serta kehormatan.²⁰

Vilfredo Pareto mendefinisikan elit politik sebagai individu yang memiliki akses penuh ke pusat kekuasaan sosial politik. Individu yang sukses dengan kemampuan memegang posisi penting dalam masyarakat dianggap elit. Akibatnya, Pareto menciptakan dua kelas dalam masyarakat. Pertama, adanya lapisan atas atau elit, yang selanjutnya dipisahkan menjadi elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit. Pareto lebih berkonsentrasi pada kelas penguasa atau yang memerintah karena kemampuan mereka menggabungkan kekuatan dengan kelicikan, yang merupakan sesuatu yang dilihatnya sebagai hal penting.²¹

Pareto memiliki masalah sentral dalam teori kekuasaannya, yaitu mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto percaya bahwa tidak ada elit yang rela mengalihkan kekuasaannya ke elit lain, bahkan jika elit tersebut telah mencapai

¹⁹ M.Rahmi Husen. 2016. Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007. Hal 6

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

tahap membusuk. Secara teori Pareto membagi elit politik menjadi dua, yaitu elit yang memerintah dan yang tidak diperintah. Munculnya konflik antar elit disebabkan oleh pembagian kekuasaan yang tidak merata antar elit.²² Marie Kolabinska berpendapat mengenai beberapa tipe sirkulasi elit ini. Pertama, sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung di dalam “*the governing elite*”. Kedua, sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung dengan “*the governing elite*” dengan massa.²³

Elit pemerintah di daerah berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang baik atau *good governance*. Namun, terciptanya pemerintahan yang baik dibutuhkan upaya yang seimbang antara cita-cita desentralisasi melalui otonomi daerah dengan proses demokratisasi di daerah. Pejabat negara baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berperan sebagai pelayan bagi rakyat dan bukan sebagai juragan.²⁴ Secara struktural, pemerintahan daerah merupakan bagian dan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, yang memiliki tugas-tugas kenegaraan mulai dari provinsi, kabupaten hingga pedesaan.

Fungsi dari pemerintah lokal dalam konteks tata kelola pemerintahan dan sistem birokrasi, adalah untuk dapat memberikan perlindungan dan pelayanan dengan baik terhadap warga dan masyarakat lokal. Orientasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, terutama pembangunan daerah niscaya elit politik daerah akan fokus pada pembangunan kapasitas daerah.²⁵

²² Farisi, Muhammad, dan Haryadi. Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi. Hal 7

²³ Haryanto. (2007). Elit, Massa, dan Kekuasaan. Hal. 23

²⁴ Halim. Politik Lokal. Hal.116

²⁵ Ibid Hal. 119

Elit pemerintahan memiliki modal berupa kekuasaan untuk meregulasikannya ke dalam bentuk kebijakan. Hal tersebut harus dioptimalkan untuk menciptakan kerukunan. Elit pemerintah disini juga memiliki peran sebagai pemenuh dan pelindung, pengayom seluruh kelompok dan elemen masyarakat. Pemerintah berperan juga sebagai pendorong dari terjadinya rasa aman, terlindungi dan penghormatan antar warga.²⁶

Dalam konsep pemikiran Max Weber mengenai tipe ideal Birokrasi menjelaskan mengenai suatu birokrasi atau administrasi memiliki bentuk yang pasti semua fungsi dijalankan dalam cara yang rasional. Menurut Max Weber terdapat tipe ideal birokrasi yang rasional yang dilakukan dalam cara-cara berikut:

1. Pejabat dibatasi oleh jabatannya manakala ia melakukan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat sendiri, tidak bebas menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi termasuk keluarganya.
2. Jabatan tersebut disusun dalam suatu tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Maka konsekuensinya adalah ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi yang di emban akan berbeda sesuai dengan jabatan yang di emban dalam hierarki.
4. Pejabat memiliki kontrak yang harus dijalankan. Uraian tugas dari masing-masing pejabat merupakan sesuatu yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. (harus bersifat netral)

²⁶ Ibid

5. Pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pension sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Pejabat dapat memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhira dalam keadaan tertentu.
7. Ada struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resources* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya

Pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu system yang dijalankan secara disimpilin.

Keterkaitan elit politik dengan penelitian ini yaitu memberikan gambaran bahwa seorang elit politik birokrasi memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Seorang elit politik birokrasi berhak untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan, rasa aman bagi masyarakat lokal itu sendiri. Selain itu, elit politik dalam birokrasi memiliki tugas dan peran yang harus dipenuhi kepada masyarakat lokal.

Jika para elit lokal birokrasi ini mengalami konflik internal, maka hal ini akan berdampak pada pemenuhan tugas dan perannya sebagai birokrasi. Selain itu, kecil besarnya konflik yang terjadi memungkinkan untuk terganggunya elit pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat yang mana akhirnya *good governance* dalam suatu pemerintahan mengalami penurunan.

2.3 Konsep Kekuasaan

Kekuasaan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *power*. Istilah kekuasaan dalam *Black's Law Dictionary* merupakan hak, kemampuan, kewenangan, atau melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan kemampuan yang menjadi bagian dari seseorang untuk dapat menghasilkan perubahan dalam hubungan hukum yang diberikan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁷ Suatu hubungan kekuasaan biasanya memiliki sifat tidak seimbang, artinya adalah terdapat satu pelaku yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain. Ketidakseimbangan itu akan menimbulkan ketergantungan dan lebih timpang hubungannya maka lebih besar juga sifat ketergantungannya.

Kekuasaan menurut Charles F. Andrain adalah penggunaan sejumlah sumber daya seperti asset dan kemampuan untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kekuasaan pada hakekatnya merupakan hubungan, karena pemegang kekuasaan memiliki kontrol terhadap sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi merupakan seorang individu ataupun kelompok.²⁸

Kekuasaan dapat bersumber dari kedudukan, kekayaan dan dari kepercayaan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Untuk dapat memperoleh kedudukan bisa didapatkan melalui adanya dukungan dari masyarakat. Pada masyarakat yang menganut paham demokrasi, upaya untuk mendapatkan dukungan agar memperoleh kedudukan dapat ditemukan. Selain dengan memperoleh dukungan, kedudukan dapat diperoleh

²⁷ Marijan, Kacung. (2016). Kekuasaan Politik Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik. Hal. 28

²⁸ Marijan, Kacung. (2016). Kekuasaan Politik Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik. Hal. 35

dengan cara mewariskan. melalui cara ini, kedudukan seseorang diperoleh dari pemberian dari pemegang kedudukan sebelumnya. Dapat diartikan bahwa pewaris akan secara otomatis memiliki kekuasaan dari kedudukan tersebut.²⁹

Kekuasaan menurut Machiavelli adalah bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi itu semua merupakan kehormatan dan kesejahteraan. Namun dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, Machiavelli mengatakan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang keji dan tidak baik. Dalam bukunya berjudul “*Il Principe*” Niccolo Machiavelli menyampaikan pembahasan mengenai politik dan kekuasaan. Adapun poin penting tersebut adalah ia menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin untuk dapat mempertimbangkan kepentingan negara di atas segalanya. Tujuan utama dari seorang pemimpin yaitu mempertahankan kekuasaan dan kestabilan negara. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemimpin harus mengambil tindakan yang diperlakukan, terlepas dari pertimbangan moralitas. Pemimpin harus mampu menggunakan kekuatannya dan manipulasi politik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, Machiavelli memfokuskan pada pentingnya kecerdikan dan kebijakan dalam menjalankan suatu kekuasaan. Karena pemimpin harus cerdas membaca situasi politik, memahami dinamika kekuasaan dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan situasi yang akan terus berubah untuk mempertahankan kekuasaan. Terakhir, Machiavelli membahas mengenai strategi dan taktik yang memberikan pengaruh dalam mempertahankan sebuah kekuasaan. Seperti dengan

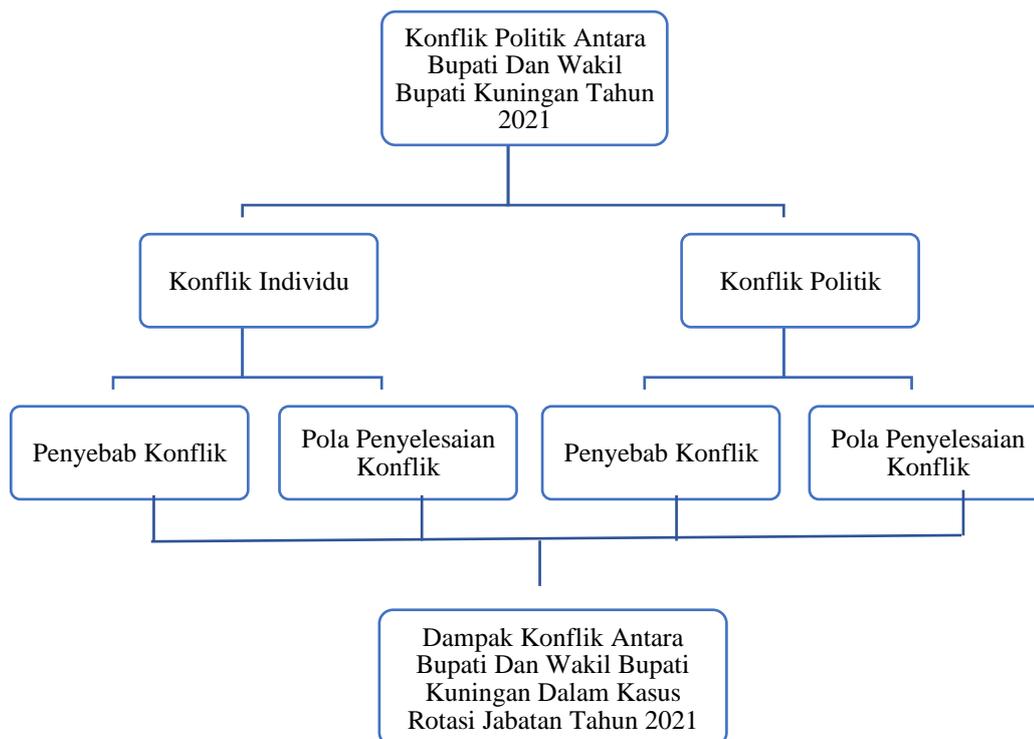
²⁹ Haryanto. *Elit, Massa, dan Kekuasaan*. Hal.60

membangun sekutu yang kuat, memenangkan kepercayaan rakyat dan bahkan mengendalikan elit politik.³⁰

Konsep kekuasaan dalam penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati sebagai petahana Kepala Daerah dua periode serta kekuasaan yang dimiliki oleh Wakil Bupati sebagai penerus dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan, sehingga ketika tidak dilibatkan beliau merasa tersinggung. Namun jika melihat dari permasalahan konflik, mutasi jabatan tersebut merupakan hak prerogatif dari Bupati itu sendiri.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



³⁰ Muhammad Boim, dkk. (2023). Ulasan Buku "II Principe" (Sang Pangeran) Karya Machiavelli. Hal. 61

Uraian:

Konflik politik antara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan saat menjalankan roda pemerintahan mendapatkan atensi yang cukup besar bagi masyarakat Kuningan serta tokoh politik kuningan. Kebersamaannya dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 ternyata mengalami keretakan di pertengahan jalan memimpin pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan merupakan tokoh atau Ketua dari partai yang sama yaitu PDI-Perjuangan.

Pada perjalanannya dalam memimpin pemerintahan Kuningan, keduanya menemui konflik pada tahun 2021. Konflik ini karena adanya kegiatan rotasi Eselon III dan Eselon IV di Kabupaten Kuningan. Dari kejadian tersebut, Ridho selaku Wakil Bupati Kabupaten Kuningan merasa tersinggung karena pendapatnya terkait mutasi Eselon tersebut tidak diakomodir, dan ia merasa bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan begitu, Ridho mengambil sikap untuk mengembalikan fasilitas berupa rumah dinas dan mobil dinas ke pemda Kabupaten Kuningan. Terjadinya konflik ini dapat terjadi akibat konflik individu, kurangnya pemahaman tugas, fungsi dan wewenang kepala dan wakil kepala daerah serta kurangnya komunikasi.

Maka dari itu, penelitian terkait konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan perlu dilakukan untuk mengetahui konflik apa yang terjadi diantara keduanya. Mengetahui penyebab pasti serta gambaran terkait konflik yang terjadi. Kemudian, perlu diketahui bagaimana PDI-Perjuangan mengambil Langkah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara Ketuanya menggunakan teori gaya

manajemen konflik menurut Thomas dan Kilmann dalam buku Prof. DR. Winardi. SE. serta mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Mengingat bahwa yang berkonflik merupakan elit politik yang duduk di pemerintah Kabupaten Kuningan.